

FENOMENA KESETARAAN GENDER DALAM KREDIT

Dwi Rachmina

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

Gender inequality still exists in Indonesia on various sectors. However, the *Gender-related Development Index* (GDI) and *Gender Empowerment Measurement* (GEM) showed an increasing trends in recent years. The increase in GDI and GEM index indicates the gender equality in education, labor and business opportunities. Meanwhile, the gender equality in access to credit and capital is still unclear. This paper discusses the gender issue in credit policy, accessibility and utilization in Indonesia using literature review. Gender factor is not explicitly considered in credit policy which means that men and women have the equality to obtain and utilize credit. In reality, the low proportion of women borrower indicates that women accessibility towards credit is lower than men. Increasing in women accessibility towards credit will bring positive effect, economically and socially, for the women themselves and their family. The important implication is that increasing in business opportunities and labor for women will increase the accessibility of women to credit.

Keywords : credit, gender equality, accessibility

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk padat dengan komposisi jumlah penduduk perempuan terpaut sangat kecil dari penduduk laki-laki, bahkan ada kecenderungan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Namun ironisnya dalam banyak hal masih terjadi ketimpangan gender sehingga seolah penduduk perempuan tidak banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya sistem dan struktur sosial masyarakat yang melakukan dikotomi gender. Ketimpangan gender pada akhirnya merugikan kaum perempuan terlihat dari banyaknya persoalan yang melibatkan kaum perempuan.

Permasalahan gender di Indonesia terjadi pada semua bidang, baik sosial, ekonomi, politik, maupun keamanan. Pada bidang pendidikan, pencapaian angka indeks pendidikan sebesar 0,83 tahun 2007 ternyata belum disertai kesetaraan gender dalam pendidikan (WDR, 2007/2008). Terlihat dari

proporsi penduduk perempuan usia lebih dari 15 tahun yang mengenyam pendidikan mulai SD hanya 67 persen sementara proporsi penduduk laki-laki untuk kelompok umur yang sama mencapai 70 persen. Demikian halnya dalam hal kesempatan kerja, rasio perempuan tidak bekerja terhadap laki-laki tidak bekerja pada tahun 2007 sebesar 155 artinya jumlah perempuan yang menganggur lebih banyak dari pada laki-laki. Sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan yaitu pertanian (45 persen) diikuti sektor jasa (40 persen) dan sektor industri (15 persen). Akibatnya perbedaan penerimaan pendapatan (PPP US \$) perempuan hanya setengah (PPP US\$ 2.410) dari pendapatan laki-laki (PPP US\$ 5.280).

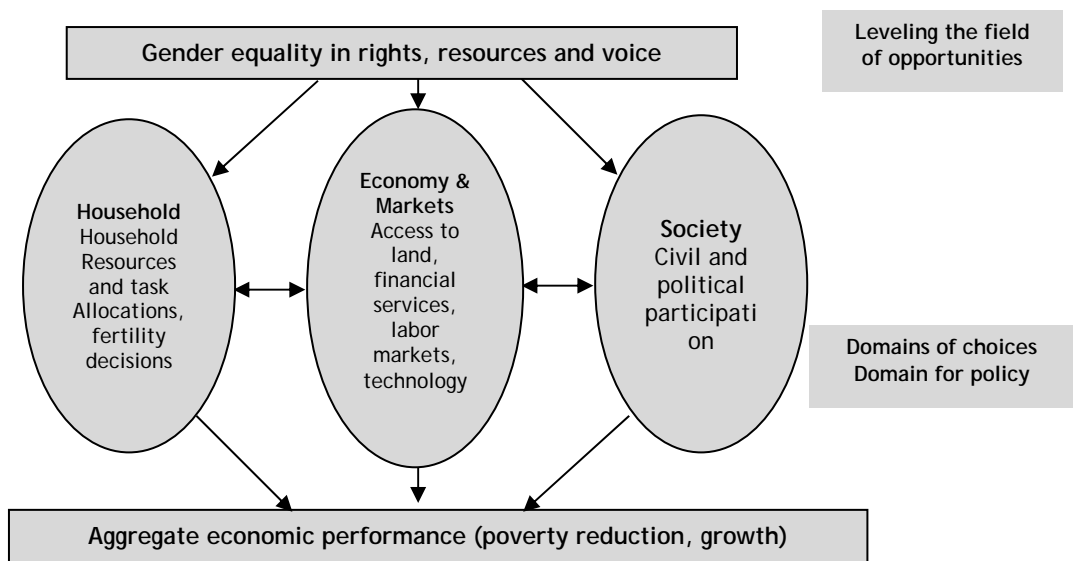
Langkah untuk memperbaiki kesetaraan gender terus dilakukan semua pihak, bahkan sudah menjadi perhatian dunia dengan memasukkan unsur gender dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, secara khusus juga dihitung Indeks Pembangunan Gender atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks

Pemberdayaan Gender atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM). GDI diukur berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan GEM diukur berdasarkan variabel partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan WDR 2007/2008, pada tahun 2007, GDI Indonesia mencapai angka 0,721 dan berada pada ranking ke 93 dari 177 negara. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka pada tahun-tahun sebelumnya seperti yang dilaporkan Kementerian Urusan Pemberdayaan Perempuan yaitu sebesar 0,639 tahun 2004 dan 0,651 tahun 2005. Sementara angka GEM Indonesia tahun 2004 sebesar 0,597 meningkat menjadi 0,613 pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan masih tertinggal terutama

disebabkan belum banyaknya keterlibatan perempuan dalam urusan politik dan pengambilan keputusan.

Walaupun angka GDI dan GEM menunjukkan kecenderungan meningkat, namun upaya peningkatan kesetaraan gender tetap harus menjadi tekad bersama dalam berbagai bidang pembangunan. Seperti ditegaskan dalam laporan Bank Dunia (2005) yang memastikan tersedianya kesempatan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Kerangka keterkaitan antara unsur-unsur yang berbeda dari kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan terlihat pada Gambar 1.



Sumber : World Bank, 2007

Gambar 1. Keterkaitan Gender dalam Berbagai Unsur Pembangunan

Di bidang ekonomi, sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan kaum perempuan, maka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang dapat dimasuki kaum perempuan menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun hal ini juga tidak terlepas dari pesatnya perubahan sosial budaya bahkan agama yang tidak lagi menganggap perempuan harus mengerjakan pekerjaan domestik serta laki-laki yang harus mencari nafkah. Data Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga 2004 mencatat pada sektor industri kecil dan rumah tangga (IKKR), sekitar 38 persen pengusahanya adalah perempuan dan sekitar 36,2 persen berusaha pada industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Pada tahun yang sama, tenaga kerja perempuan yang diserap pada sektor IKKR mencapai 43,3 persen dari total tenaga kerja yang terserap di IKKR.

Semakin meningkatnya kesetaraan gender dalam pendidikan, kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha menimbulkan pertanyaan apakah juga diikuti dengan kesetaraan gender dalam mengakses sumber keuangan dan permodalan? Beberapa hasil penelitian di negara berkembang menunjukkan terjadi ketimpangan gender dalam aksesibilitas kredit. Raturi and Swamy (1999) mengemukakan terjadi diskriminasi gender dalam pengajuan aplikasi dan penolakan kredit. Coleman (2000), menemukan bahwa tingkat bunga dan nilai jaminan pada debitur perempuan lebih tinggi dari pada debitur laki-laki menunjukkan bahwa kreditur melihat bahwa perempuan memiliki resiko kredit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara Storey (2004) dan Kim (2006) menunjukkan bahwa tidak terbukti secara statistik bahwa perempuan pengusaha lebih mengalami kesulitan dalam mengakses kredit. Hal ini disebabkan performance usaha yang dikelola perempuan tidak berbeda jauh dengan yang dikelola laki-laki. Artinya, kreditur

memberi perlakuan kredit yang berbeda bukan karena pertimbangan jenis kelamin melainkan pertimbangan prospek bisnis.

Keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh yang telah diadopsi oleh banyak negara juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi debitur yang bertanggungjawab dan mampu memanfaatkan dana kredit untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga. Pertanyaannya sejauhmana kesetaraan gender dalam perkreditan di Indonesia?

2. TUJUAN

Berdasarkan uraian latar belakang, tulisan ini akan membahas fenomena gender dalam kebijakan, aksesibilitas dan pemanfaatan kredit di Indonesia.

3. METODE DAN BATASAN PENULISAN

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada studi literatur dari berbagai sumber, termasuk didalamnya hasil kajian empirik dari beberapa penelitian sebelumnya. Berbagai informasi dan data dari berbagai sumber dirangkum dengan menggunakan kerangka analisis yang akan diuraikan pada Bab II untuk menjawab tujuan yang diteliti ditentukan.

KERANGKA ANALISIS

Ada tiga konsep yang akan dipadukan dalam kerangka analisis ini, yaitu konsep kredit, konsep gender dan konsep kesetaraan. Dengan demikian bab ini akan membahas pada tiga *konsep tersebut*.

1. KONSEP KREDIT

Pada dasarnya kredit dipandang sebagai barang ekonomi, sama halnya seperti barang dan jasa lainnya. Sebagai barang ekonomi, kredit merupakan transaksi modal yang disertai kepercayaan. Kredit yang diterima debitur umumnya dialokasikan untuk menambah modal usaha, sehingga seringkali kredit juga dikatakan sebagai sumber pembiayaan. Biaya kredit meliputi bunga kredit dan *transaction cost* yaitu biaya yang diperlukan selain bunga kredit.

Secara umum pasar kredit terbagi dua yaitu pasar kredit formal dan kredit non formal. Kredit formal bersumber dari lembaga keuangan formal, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Sedangkan kredit non-formal berasal dari lembaga keuangan non-formal, seperti pedagang/tengkulak, pengijon, tetangga, keluarga dan atau rentenir. Kredit formal dapat dibedakan menjadi kredit komersial dan kredit program. Kredit komersial yaitu transaksi kredit terjadi melalui mekanisme pasar, sedangkan kredit program merupakan kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan biasanya bersubsidi.

Dalam kredit dikenal juga istilah kredit mikro yaitu kredit yang ditujukan kepada usaha kecil dan mikro. Sementara berdasarkan alokasi penggunaan kredit, dikenal kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif dapat dibedakan lagi menjadi kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pemberian kredit, khususnya pada kredit formal komersial, akan memperhatikan 5C yaitu *character, capacity, condition of economy, collateral, dan capital*.

2. KONSEP GENDER

Konsep dan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin secara biologis. Gender menekankan pada sifat dan peran yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996 dan Mosse, 1996). Jenis kelamin secara biologis tidak akan mengalami perubahan, namun sifat dan peran kaum perempuan dan laki-laki sangat dinamis sesuai dengan dinamika sosial-budaya dalam masyarakat serta arah kebijakan dan politik suatu negara. Pemaknaannya yaitu analisis gender menjadi penting dalam membahas persoalan pembangunan dan sosial.

Tidak sedikit konstruksi sosial gender yang menimbulkan ketidakadilan (*inequalities*) dalam proses pembangunan sehingga memberikan konsekuensi negatif baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan tersebut lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan perjuangan mengurangi atau menghilangkan akibat buruk terhadap kaum perempuan dengan munculnya pemikiran atau konsep "Women in Development" atau dikenal dengan WID. Namun demikian, WID dinilai gagal dalam memperjuangkan peran kaum perempuan karena terlalu berorientasi pada kaum perempuan serta kurang menekankan pada analisis hubungan gender. Sebagai langkah perbaikan muncul pemikiran atau konsep "Gender and Development" atau GAD yang menekankan pada pentingnya melihat relasi gender dalam pembangunan yang akan menghasilkan perubahan jangka pendek atau "praktis" dan perubahan jangka panjang atau "strategis". Dengan demikian, konsep gender yang digunakan dalam tulisan ini adalah relasi, peran, dan pengambilan keputusan yang

mengarah pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Gender menjadi isu penting dalam pembangunan mengingat pembangunan akan melibatkan dan sekaligus memberikan dampak kepada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pemahaman tentang gender dalam perumusan konsep dan pendekatan pembangunan sangat diperlukan sehingga hasil yang dicapai tidak menimbulkan ketimpangan gender. Beberapa bentuk ketimpangan gender yaitu (1) marginalisasi perempuan baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, (2) Subordinasi terhadap perempuan, (3) Stereotipe masyarakat terhadap perempuan, (4) Kekerasan terhadap perempuan, (5) Beban kerja ganda bagi perempuan.

3. KESETARAAN GENDER DALAM KREDIT

Kesetaraan gender berarti semua perempuan dan laki-laki mempunyai hak-hak ekonomi, sosial dan politik yang sama dan kesempatan yang sama untuk peningkatan diri dan kesejahteraan. Tentu saja hal ini bukan berarti semua orang harus diperlakukan persis sama atau mereka harus melakukan hal-hal yang sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai harapan dan kepentingan yang berbeda terkait masa depan yang lebih baik.

Kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dikaji dengan menggunakan tiga kerangka analisis untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender (Moses, 1996). Ketiga kerangka analisis tersebut yaitu (1) kerangka analisis Harvard, (2) Kerangka Analisis Moser, (3) Kerangka Pemberdayaan. Kerangka Harvard menekankan pada analisis situasi sebelum membuat perencanaan program pembangunan yang meliputi pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan di dalam masyarakat.

Kerangka Moser menekankan pada proses perencanaan program pembangunan terkait dengan pembagian peran, analisis kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Sedangkan kerangka pemberdayaan menekankan pada tahapan pemberdayaan yang tercermin dari aspek peningkatan pemerataan, pemampuan kesejahteraan, dan aspek penguasaan.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut, kesetaraan gender dalam perkreditan akan dikaji pada dua level yaitu level kebijakan dan level implementasi. Analisis pada level kebijakan ditekankan apakah suatu kebijakan mengandung kesetaraan gender atau sebaliknya bias gender. Sedangkan analisis pada level implementasi, ditekankan pada tiga indikator (1) aksesibilitas, (2) peran dan tanggungjawab, serta (3) pemanfaatan.

FENOMENA KESETARAAN GENDER DALAM KREDIT

1. KESETARAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN KREDIT

Kebijakan perkreditan, terutama untuk kredit komersial konvensional, meliputi penentuan tingkat bunga, plafon, jaminan, jangka waktu, persyaratan, disusun berdasarkan rasionalitas ekonomi dengan mengedepankan pencapaian margin serta minimisasi risiko. Keputusan kredit lebih banyak mengedepankan pertimbangan 5C. Faktor gender tidak secara eksplisit menjadi aspek yang dipertimbangkan. Fenomena ini dapat diterjemahkan dari dua sudut pandang yang berbeda antara pandangan optimis dan pandangan pesimis. Pertama, pandangan optimis akan menerjemahkan bahwa kebijakan kredit memang terbuka untuk laki-laki dan perempuan artinya sudah mengandung kesetaraan gender. Sedangkan pandangan

pesimis, justru akan memandang bahwa kebijakan kredit tidak memihak pada kesetaraan gender, khususnya pada perempuan. Pemikiran kaum pesimis ini terutama didasarkan pada fakta bahwa dalam kondisi bersaing, maka perempuan relatif kalah dibandingkan laki-laki.

Oleh karena kebijakan kredit tidak membedakan berdasarkan gender. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan untuk mendapatkan dan memanfaatkan kredit. Dengan demikian, jika terjadi persoalan rendahnya aksesibilitas perempuan terhadap kredit bukan bersumber dari produk kebijakan melainkan karena ada penyebab lain. Kebijakan kredit terkadang bias sektoral atau bias skala usaha yang semata-mata karena pertimbangan rasionalitas ekonomi.

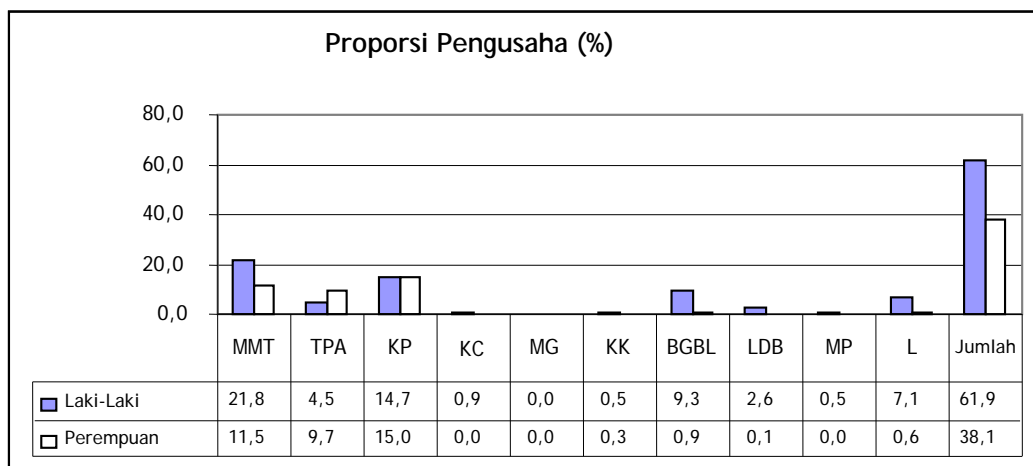
Lain halnya dengan kebijakan kredit program yang memang dibuat untuk tujuan tertentu biasanya mengarah pada kelompok sasaran tertentu, termasuk perempuan. Banyak kredit program yang tidak membedakan kelompok sasarannya berdasarkan gender, artinya laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang setara. Namun, tidak sedikit kredit program yang justru bias pada kelompok sasaran perempuan, seperti Program P2KP, Karya Usaha Mandiri (KUM), dan Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K). Tidak banyak kredit program yang secara eksplisit hanya ditujukan kepada kelompok sasaran laki-laki.

2. AKSESIBILITAS KREDIT BERDASARKAN GENDER

Untuk melihat aksesibilitas kredit berdasarkan gender dapat dilihat dari proporsi debitur laki-laki dan perempuan. Secara agregate data atau informasi tersebut sulit diperoleh, walaupun sebenarnya dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa membahas kredit berdasarkan gender belum menjadi kepentingan publik. Bisa dimengerti mengingat kebijakan kredit, terutama kredit formal komersial, tidak menekankan pada aspek gender.

Namun demikian, hampir dapat dipastikan dan dipahami bahwa proporsi jumlah debitur laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan debitur perempuan. Artinya berdasarkan jumlah debitur maka aksesibilitas laki-laki terhadap kredit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pertanyaannya adalah apakah benar perempuan kurang akses terhadap kredit karena kurang memenuhi persyaratan kredit atau karena kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha yang dibiayai kredit. Oleh karena itu akan menjadi lebih fair jika pengukuran aksesibilitas kredit berdasarkan gender dikoreksi dengan proporsi gender dalam aktivitas usaha (baik sebagai pengusaha atau pekerja). Hal ini mengingat pemberian kredit, termasuk kredit konsumsi, selalu dikaitkan dengan kegiatan usaha. Hampir tidak pernah kredit diberikan kepada penduduk yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan.

Jika melihat data Statistik Industri Kecil dan Rumahtangga tahun 2004 (IKKR, 2004), dari total 2,67 juta usaha IKKR hanya 38,15 persen yang pengusahanya adalah perempuan (BPS, 2006), seperti terlihat pada Gambar 2.



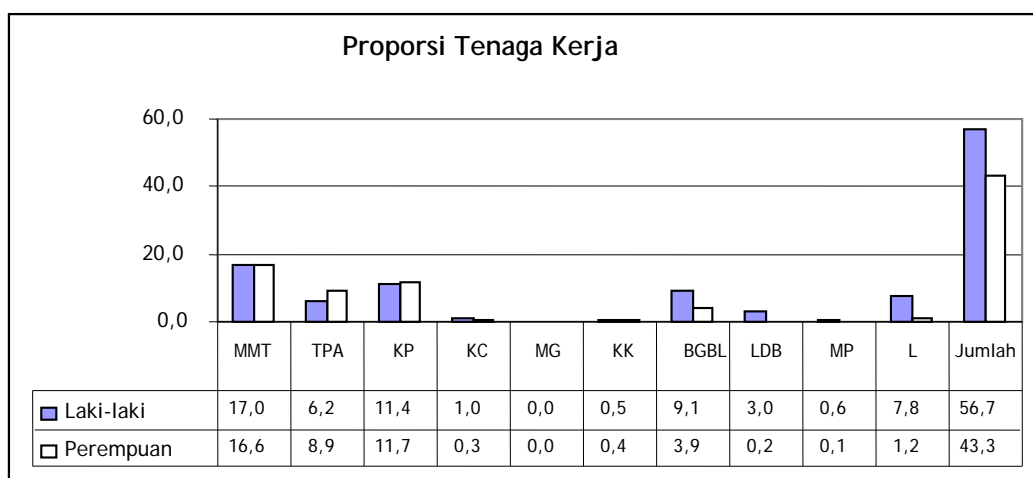
Gambar 2. Proporsi Pengusaha IKKR menurut Jenis Kelamin

Keterangan :

1. MMT = Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
2. TPA = Industri Tekstil, Produk Kulit dan Alas Kaki.
3. KP = Industri Kayu dan Produk Kayu.
4. KC = Industri Kertas dan Cetakan.
5. MG = Industri Minyak dan Gas.
6. KK = Industri Kimia dan Karet.
7. BGBL = Industri Barang Galian Bukan Logam.
8. LDB = Industri Logam Dasar dan Barang dari logam.
9. MP = Industri Mesin dan Perlengkapan.
10. L = Industri Lainnya.

Proporsi tenaga kerja perempuan dalam IKKR relatif seimbang yaitu mencapai 43,29 persen dari total 6,55 juta orang (Gambar 3). Rendahnya proporsi perempuan pengusaha maupun perempuan pekerja terjadi juga pada

kegiatan usaha lainnya. Artinya semakin jelas bahwa pengukuran aksesibilitas terhadap kredit menurut gender harus dilihat secara proporsional berdasarkan kesempatan berusaha dan bekerja.



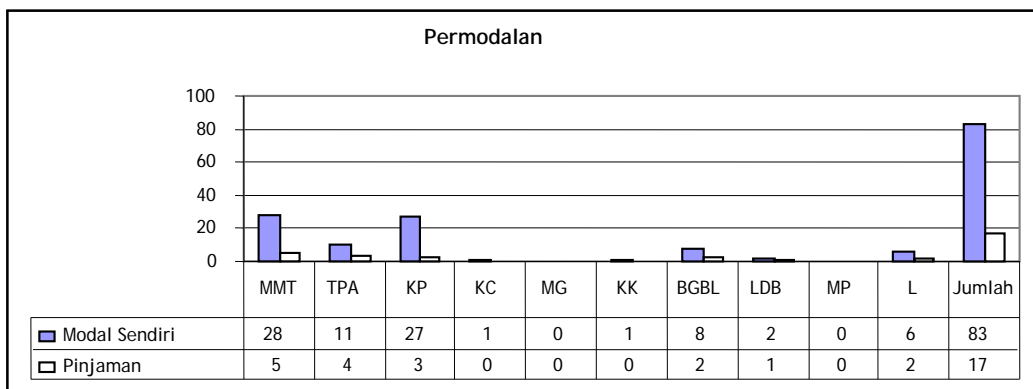
Gambar 3. Proporsi Tenaga Kerja IKKR menurut Jenis Kelamin

Hasilnya diduga bahwa tingkat aksesibilitas perempuan akan lebih tinggi dibandingkan ukuran sebelumnya (tanpa koreksi). Hal ini sekaligus memberikan implikasi bahwa peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja pada perempuan akan meningkatkan aksesibilitas perempuan pada kredit. Pada gilirannya jika kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan meningkat yang kemudian diikuti dengan peningkatan aksesibilitas perempuan terhadap kredit, maka kontribusi perempuan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga juga akan meningkat. Dengan pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga yang meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan. Dalam arti luas, aksesibilitas kredit mempunyai potensi untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia.

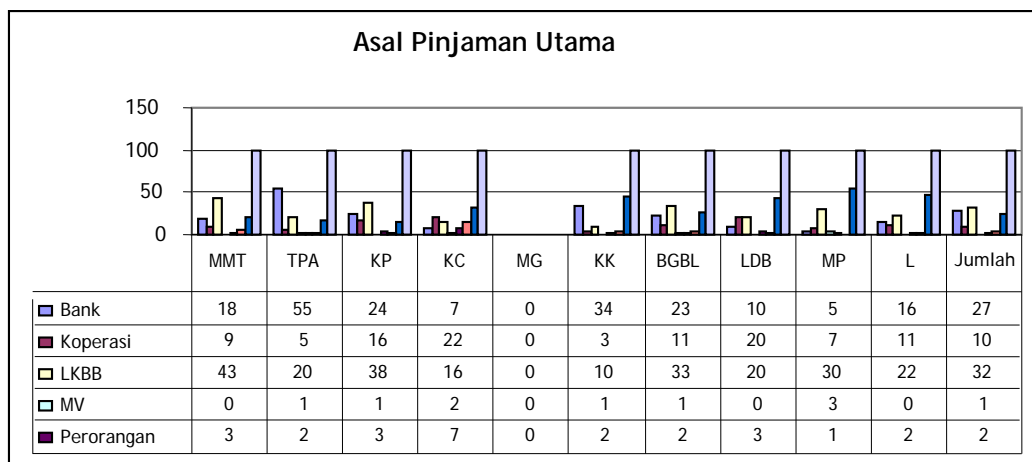
Permodalan pada hampir semua usaha diketahui masih menjadi sumber permasalahan yang menghambat pengembangan usaha, walaupun bukan utama. Berdasarkan data statistik IKKR 2004, bahwa sekitar 83 persen usaha IKKR hanya menggunakan modal sendiri atau hanya 17 persen yang menggunakan modal

pinjaman atau kredit (Gambar 4). Sebagian besar (69 persen) kredit tersebut berasal dari kredit formal dengan sumber kredit terbanyak dari lembaga keuangan bukan bank (32 persen), seperti terlihat pada Gambar 5. Karena keterbatasan data, tidak dapat diketahui persisnya proporsi berdasarkan gender. Namun dapat diduga bahwa aksesibilitas terhadap kredit bagi perempuan pengusaha IKKR lebih rendah dibandingkan laki-laki.

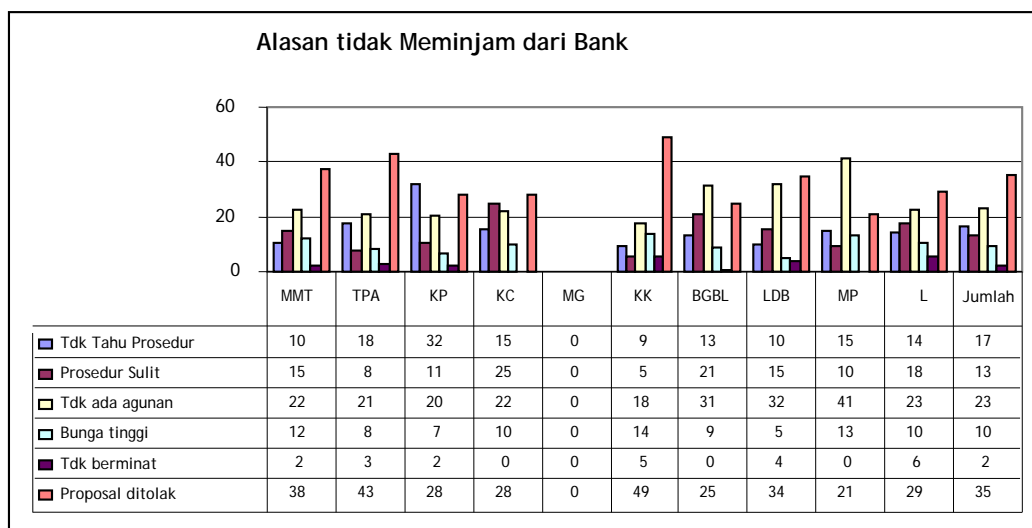
Jika ditelaah berdasarkan alasan tidak meminjam, ternyata 35 persen menyatakan alasan karena proposalnya ditolak. Artinya, IKKR yang saat ini tidak meminjam kredit bukan karena tidak membutuhkan kredit tetapi karena tidak memenuhi persyaratan kredit. Hanya ada 2,4 persen IKKR yang benar-benar tidak berminat untuk mengambil kredit (Gambar 6). Alasan lain tidak meminjam kredit yaitu tidak tahu prosedur (16,7 persen), prosedur sulit (13,4 persen), tidak ada agunan (23 persen), dan bunga tinggi (9,5 persen). Berdasarkan alasan tersebut, maka kredit sangat dibutuhkan oleh IKKR untuk pengembangan usaha.



Gambar 4. Proporsi Sumber Permodalan IKKR



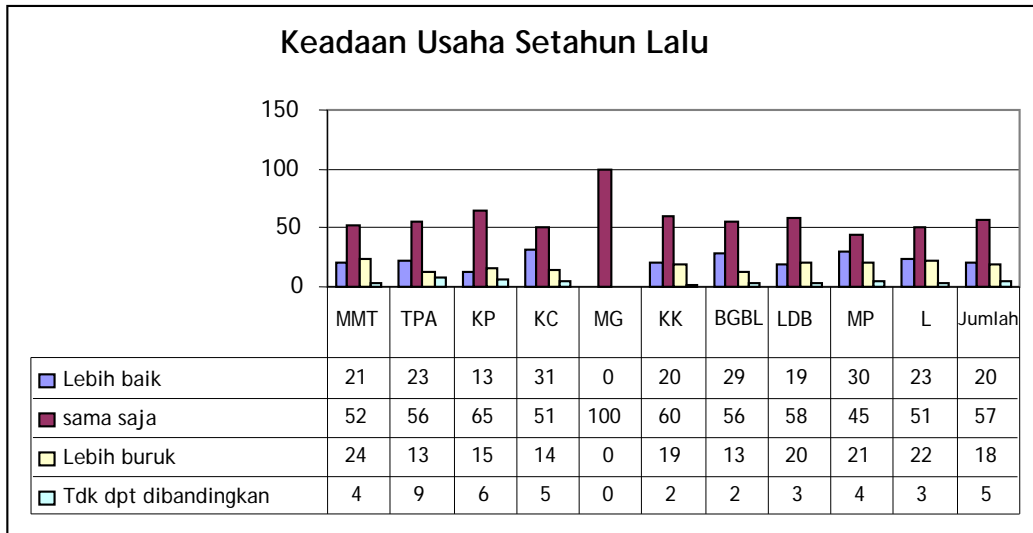
Gambar 5. Proporsi Asal Pinjaman IKKR



Gambar 6. Proporsi IKKR Berdasarkan Alasan Tidak Meminjam dari Bank

Kurangnya pasokan kredit pada IKKR merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan usaha. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa hanya 19,9 persen IKKR yang kondisi usahanya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 7). Artinya sebagian besar usaha IKKR tidak mengalami pertumbuhan usaha. Walaupun bukan satu-satunya faktor penyebab lambatnya pertumbuhan usaha IKKR, namun keterbatasan kredit memberikan kontribusi pada lambatnya

pertumbuhan usaha. Permasalahan utama yang dirasakan IKKR adalah masalah pemasaran. Lambatnya pertumbuhan usaha menunjukkan kinerja usaha yang kurang baik dan hal ini dapat diduga yang menyebabkan usaha IKKR sulit mendapatkan kredit. Penolakan kredit oleh lembaga keuangan formal, khususnya perbankan, umumnya disebabkan karena usaha yang akan dibiayai kredit tidak layak atau kemampuan usaha untuk mengembalikan kredit tersebut rendah.



Gambar 7. Proporsi IKKR Berdasarkan Keadaan Usaha Setahun Lalu

Pada sisi lembaga keuangan, terutama perbankan, strategi yang lazim dipilih untuk meningkatkan jumlah penyaluran kredit yaitu dengan cara menambah plafon kredit bagi nasabah lama. Sehingga peningkatan kredit pada sisi supply belum tentu diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah secara signifikan. Alasannya sudah dapat ditebak karena nasabah baru memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan nasabah lama yang kinerja kreditnya baik. Hal ini terkait dengan pertimbangan unsur *character* yang juga menjadi pertimbangan pemberian kredit. Demikian halnya, adanya tuntutan bahwa lembaga keuangan harus mampu menghasilkan profit untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya, maka sangatlah wajar jika lembaga keuangan berusaha untuk menghindari calon nasabah yang memiliki risiko lebih tinggi.

Beberapa hasil penelitian memperkuat dugaan bahwa aksesibilitas terhadap kredit antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keterbatasan penelitian, seperti halnya data agregate, juga masih dilihat berdasarkan

proporsi jumlah nasabah laki-laki dan perempuan tanpa memperhitungkan jumlah populasi masing-masing. Pada kredit mikro P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Depok misalnya terdapat 61 persen nasabah laki-laki dan 39 persen nasabah perempuan (Tarmidi, 2006). Begitu juga pada program P2KP di Bogor, hanya ada 24 persen KSM yang keanggotaannya perempuan (Lu'lu, 2005). Padahal P2KP, walaupun tidak secara eksplisit, merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan peluang lebih besar pada anggota perempuan dibandingkan laki-laki. Namun ternyata aksesibilitas perempuan masih tetap lebih rendah.

Tidak berbeda dengan Tarmidi, penelitian Nainggolan (2005) juga menunjukkan bahwa aksesibilitas perempuan pada program P2KP lebih rendah. Tidak lebih dari 40 persen dari anggota maupun pengurus P2KP adalah perempuan. Penyebabnya karena perempuan yang memiliki usaha masih sangat sedikit. Hal ini diduga karena budaya patriarkhi yang kuat mengakar di lokasi program. Anggapan bahwa

perempuan lebih baik di rumah dan laki-laki yang wajib mencari nafkah merupakan alasan utama kenapa perempuan jarang yang memiliki usaha. Kalaupun memiliki usaha, maka sektor informal yang menjadi pilihan dengan skala mikro atau kecil dan berpendapatan rendah.

Lebih jauh dijelaskan Nainggolan, bahwa pada perempuan yang meminjam kredit maka keputusan akhir apakah meminjam atau tidak ditentukan oleh ada tidaknya ijin suami. Demikian halnya dengan penentuan besar kredit dan penggunaan kredit, pengaruh suami sangat besar. Artinya, perempuan yang mampu mengakses kredit pun ternyata tidak otomatis dapat mengontrol kredit tersebut. Dengan kata lain, pada kasus rumahtangga miskin, akses dan kontrol perempuan (istri) dalam hal kredit masih rendah. Selain karena pengaruh budaya patriarkhi, rendahnya tingkat pendidikan perempuan (dalam rumahtangga miskin) juga menjadi penyebabnya. Sehingga membuat perempuan kurang percaya diri dan ragu dalam mengambil kesimpulan.

Pada kredit komersial, seperti kupedes pada Bank Rakyat Indonesia, aksesibilitas perempuan juga jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan Novitasari (2006), Khairunnisa (2005), dan Sari (2007) bahwa perempuan yang menjadi debitur kupedes tidak lebih dari 20 persen. Berdasarkan beberapa data empiris tersebut semakin memperkuat bahwa aksesibilitas perempuan terhadap kredit masih rendah. Walaupun terdapat beberapa kondisi yang berbeda, seperti terjadi pada kredit program Reksa Desa di Bogor yang ternyata 79 persen penerima kredit bergulir Reksa Desa adalah perempuan (Mirdianingsih, 2006). Namun demikian, program ini masih sangat terbatas di Propinsi Jawa Barat dan belum meluas. Kondisi ini tidak berbeda dengan

hasil penelitian Syukur (2002), dimana semua anggota KUM adalah perempuan.

Jika dilihat dari beberapa variabel yang diduga mempengaruhi pemberian kredit, ternyata secara empiris menunjukkan tidak ada perbedaan performance yang signifikan antara debitur laki-laki dengan debitur perempuan, baik performance kredit, usaha maupun individu (Tabel 1). Kesimpulan lain yang dapat dilihat adalah lembaga keuangan tidak memandang bahwa terdapat resiko yang berbeda antara debitur laki-laki dan debitur perempuan. Kondisi ini berlawanan dengan Coleman (2000) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan dimana tingkat bunga dan nilai jaminan pada debitur perempuan lebih tinggi. Performance kredit dilihat dari aspek besar kredit, tingkat bunga kredit, biaya transaksi, tingkat pengembalian kredit, lama waktu realisasi kredit, frekuensi kredit atau pengalaman kredit, dan nilai agunan. Sedangkan performance usaha dilihat dari aset usaha, pendapatan atau keuntungan usaha, dan modal usaha. Sedangkan karakteristik individu atau rumahtangga dilihat dari umur, pendidikan, pengalaman usaha, dan tanggungan keluarga.

Fenomena empiris bahwa pada satu sisi proporsi debitur perempuan masih sedikit sedangkan di sisi lain performance debitur yang tidak berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesetaraan gender bukan setelah menjadi debitur melainkan pada saat akan menjadi debitur. Dengan kata lain, hal penting yang perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, terutama perempuan, untuk dapat memenuhi persyaratan menjadi debitur. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut harus datang dari semua pihak, baik lembaga keuangan, masyarakat, maupun pemerintah.

Tabel 1. Perbedaan Performance Kredit, Usaha, dan Individu menurut Jenis Kelamin

Dependent Variabel	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4
A. Performance Kredit				
a. Besar Kredit	Negatif*	Negatif*	Positif*	Negatif*
b. Tingkat bunga	Negatif*			
c. Biaya Transaksi	Negatif*			
d. Tingkat pengembalian				Negatif *
e. Waktu Realisasi				Negatif**
f. Frekuensi Kredit		Negatif*	Positif*	
g. Agunan		Positif*	Negatif*	
B. Performance Usaha				
a. Aset Usaha		Negatif *	Positif *	
b. Pendapatan		Positif*	Negatif*	Positif*
c. Modal Usaha			Positif*	
C. Performance Individu				
a. Umur		Negatif*		Positif *
b. Pendidikan		Negatif*		Positif*
c. Pengalaman Usaha			Positif*	Positif*
d. Tanggungan Keluarga				Negatif*

Sumber : diolah dari beberapa penelitian

Keterangan :

1. Sumber 1 = Anonimous.
2. Sumber 2 = Kupedes BRI Pedesaan (Ilwah).
3. Sumber 3 = Kupedes BRI Perkotaan dan Pedesaan (Wulan).
4. Sumber 4 = Reksa Dana.
5. * = Tidak beda nyata.
6. ** = Beda nyata.

Beranjak dari uraian tersebut, maka menjadi penting untuk menciptakan keharmonisan antara sisi penawaran dan sisi permintaan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit. Keharmonisan akan terjadi apabila ada sinergi yang baik antara perbaikan pada kelembagaan keuangan sebagai pemasok kredit dan kondisi usaha sebagai yang membutuhkan dan memanfaatkan kredit.

Langkah pro-aktif dan keberpihakan dari sisi lembaga keuangan dan unsur lain yang dapat menyediakan kredit sangat diperlukan. Secara khusus dapat diberikan porsi tertentu terhadap calon debitur perempuan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi. Dalam arti, penambahan alokasi kredit untuk calon maupun debitur perempuan lebih besar tanpa harus menghilangkan kesempatan calon atau debitur laki-laki untuk mendapatkan kredit. Hal ini

tentu saja harus diikuti dengan peningkatan total dana kredit yang akan dialokasikan, jadi bukan memindahkan bagian alokasi kredit untuk debitur laki-laki ke debitur perempuan.

Pada sisi permintaan, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit, maka diperlukan berbagai upaya yang dapat memperbaiki kinerja usaha. Langkah perbaikan tersebut terkait dengan aspek pemasaran, manajemen, sumberdaya manusia (pengusaha maupun pekerja), dan teknologi. Keempat aspek tersebut merupakan *necessary condition* yang harus terpenuhi. Sehingga pada akhirnya sektor usaha dapat mengakses kredit karena memang usahanya layak untuk memperoleh kredit dan mampu memanfaatkan kredit secara optimal.

Dengan kata lain, perbaikan pada sisi penawaran maupun permintaan harus berjalan seiring. Peranan pemerintah dipandang penting

untuk mencapai keharmonisan tersebut. Pada sisi penawaran, peranan pemerintah diperlukan untuk mendorong penyediaan kredit melalui berbagai kebijakan kredit. Mengingat kemampuan sektor usaha yang pada umumnya usaha kecil dan mikro masih rendah untuk dapat mengakses kredit. Pada saat yang sama, peranan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja usaha melalui berbagai kebijakan yang mendukung dan sekaligus mendorong sektor usaha untuk menjadi usaha yang tangguh dan *bankable* atau *creditable*.

Merujuk pemikiran yang dikembangkan Khandker (1995) yang juga diaplikasikan oleh Syukur (2002), bahwa keberlanjutan suatu skim kredit berkaitan dengan tiga hal yaitu (1) viabilitas finansial, (2) viabilitas kelembagaan atau manajerial, dan (3) viabilitas peserta atau peminjam (debitur). Viabilitas finansial berarti kredit dapat menutupi seluruh biaya operasi dari pendapatan yang diperoleh (bunga) dari peminjam pada suatu periode waktu tertentu. Viabilitas kelembagaan dimaksudkan sejauhmana kelembagaan kredit (*delivery system*) dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara viabilitas peminjam (debitur) artinya keuntungan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut dapat menutup semua biaya kredit (bunga) dan pokok pinjaman.

Belajar dari pengalaman Grameen Bank, secara bertahap dan memulai dari bawah tetapi terus memperjuangkan perbaikan hidup kaum perempuan. Grameen menetapkan dan berusaha untuk terus dapat mencapai target bahwa setengah dari peminjamnya adalah perempuan. Hal ini mengingat kaum perempuan sangat miskin dan tertindas, sehingga untuk membantunya maka mereka harus dibantu untuk bangkit dari keterpurukan.

Prinsip yang dikembangkan Grameen Bank yang menganggap bahwa setiap peminjam dapat dipercaya, sangat berlawanan dengan praktek yang terjadi pada perbankan konvensional yang semuanya diikat dengan perjanjian hukum. Prinsip *mutual trust* benar-benar menjadi pondasi dalam membangun Grameen Bank. Mengutip tulisan dalam buku Bank Kaum Miskin yaitu :

"kami yakin bahwa bank harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan di atas perjanjian kertas yang hampa makna. Kalau ada peminjam yang gagal membayar, kami tidak menganggap mereka jahat. Pinjaman bermasalah justru jadi pengingat terus menerus mengenai perlunya kami berbuat lebih banyak untuk keberhasilan nasabah kami".

Perjalanan panjang Grameen Bank memberikan bukti bahwa dengan kepedulian dan keberpihakan disertai upaya keras secara terus menerus, kesetaraan gender dapat dicapai. Kisah sukses Murshida Begum dalam "*to our credit*" memberi contoh nyata bahwa bagaimana orang-orang (miskin) bisa jauh lebih mudah untuk mencapai potensi diri sepenuhnya setelah punya akses kredit. Dan untuk melakukan hal tersebut, secara ekonomi sulit dijelaskan karena diperlukan adanya "kesadaran sosial".

3. DAMPAK PEMAFATAN KREDIT MENURUT GENDER

Keberhasilan pemberian kredit tidak hanya diukur dari besarnya *disbursement* dan *repayment* serta rendahnya tunggakan, melainkan juga apakah kredit mampu memberikan dampak ekonomi maupun sosial bagi nasabah dan keluarganya. Pemahaman hal ini akan dicoba dilihat berdasarkan

beberapa hasil penelitian, tentu saja dengan segala keterbatasan data.

Berdasarkan tampilan hasil penelitian seperti pada Tabel 1, maka dapat dijelaskan bahwa performance kredit, usaha, maupun individu debitur perempuan tidak berbeda nyata dengan debitur laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan memperoleh kesempatan sama dalam hal mendapatkan kredit, maka hasil usaha yang diperoleh tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Syukur (2002) pada anggota KUM di Bogor, bahwa pemberian kredit mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan usaha dan pendapatan rumah tangga sekitar 25-40 persen. Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga peserta, walaupun inelastis. Syukur menekankan bahwa tidak hanya akses modal yang perlu diperhatikan tetapi perlu dibarengi akses teknologi dan pasar.

Dampak lebih jauh yang dapat dilihat dari hasil penelitian Syukur adalah bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga yang lebih baik, karena akses ke kredit, mengakibatkan kondisi pendidikan, konsumsi, dan kesehatan rumah tangga juga menjadi lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada peningkatan angka GDI dan akhirnya IPM secara keseluruhan.

Demikian halnya, hasil penelitian Osmani (2007) dengan menggunakan data peminjam Grameen Bank di Bangladesh menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan menjadi nasabah Grameen Bank mampu meningkatkan *bargaining power* perempuan di dalam rumah tangga. *Bargaining power* perempuan dalam rumah tangga berbeda secara signifikan antara perempuan nasabah Grameen Bank dan bukan nasabah. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa keterbelakangan

perempuan seringkali bukan karena ketidakmampuan perempuan secara individu melainkan karena tekanan sosial budaya, seperti budaya patriarki yang juga terjadi di masyarakat Bangladesh. Terbukti, ketika budaya ini ditembus melalui "penyadaran sosial", maka perempuan mampu memberdayakan potensi dirinya.

Bhagowalia, Chen and Shivey (2007) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam anggota rumah tangga untuk ikut memutuskan penggunaan input ataupun teknologi rendah karena memang perempuan tersebut tidak diberi kesempatan. Hal ini terlihat pada beberapa kasus perempuan kepala rumah tangga yang ternyata mampu mengambil keputusan dengan baik dalam pengalokasian input untuk kegiatan usahatani.

Dari hasil penelitian Syukur (2002) juga terlihat bahwa kemampuan menabung dari anggota KUM sangat tinggi yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya tunggakan kredit. Perempuan dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu sekalipun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (bunga KUM 35% per tahun, sementara bunga bank komersial pada saat itu 22-23% dan BPR 36-60%). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap kredit bagi perempuan telah berdampak pada peningkatan kemampuan *capital accumulation* pada perempuan. Hal ini dapat dimengerti karena umumnya perempuan lebih pandai menabung dibandingkan laki-laki. Artinya, perempuan memiliki potensi sangat besar dalam upaya pemupukan modal di masa depan. Demikian halnya dengan kemampuan membayar yang lebih baik, menunjukkan bahwa pada saat perempuan diberi kepercayaan, maka akan menggunakan kepercayaan tersebut sebaik mungkin dan berusaha menjaga kepercayaan

itu supaya berkelanjutan. Dan kredit pada dasarnya adalah transaksi kepercayaan.

Deininger, Galab and Olsen (2005) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa perempuan yang memiliki akses kepada kredit mikro memiliki hambatan lebih rendah dalam komunikasi dalam rumahtangga maupun dalam interaksi sosial maupun pemerintahan dibandingkan perempuan yang tidak akses kepada kredit. Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk meningkatkan angka pemberdayaan perempuan (GEM), maka peningkatan aksesibilitas perempuan pada kredit adalah salah satu caranya.

Semakin memperkuat bahwa peningkatan akses perempuan pada kredit memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi perempuan dan keluarganya, tetapi juga pada aspek sosial. Secara keseluruhan akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini diperkuat oleh Pitt, Khandaker and Cartwright (2006) yang melakukan penelitian di Bangladesh menyimpulkan bahwa aksesibilitas perempuan pada kredit telah berdampak pada (1) peningkatan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumahtangga, (2) peningkatan akses pada keuangan dan sumberdaya ekonomi rumahtangga, (3) peningkatan jaringan sosial, (4) peningkatan "bargaining power", (5) peningkatan mobilitas, dan (6) peningkatan keterlibatan dalam perencanaan keluarga. Hasil penelitian Fletschner (2000) juga memperkuat pendapat temuan Pitt, Khandaker and Cartwright. Bahkan ditambahkan bahwa pada keluarga dimana perempuan dapat akses pada kredit atau capital, maka pendidikan dan kesehatan anggota keluarga (terutama anak-anak) menjadi meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarikan bahwa peningkatan aksesibilitas

perempuan pada kredit dapat memberikan dampak positif, baik ekonomi maupun sosial, pada individu perempuan itu sendiri dan keluarganya. Artinya kualitas hidup perempuan dan keluarga akan meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan angka indeks GDI, GEM dan HDI secara nasional. Dengan demikian akan memberikan kontribusi pada peningkatan derajat suatu bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika perempuan diberi kesempatan untuk mendapat kesetaraan gender dalam kredit.

PENUTUP

Mempelajari fenomena kesetaraan gender dalam kredit membawa pada suatu kesimpulan bahwa sedang ada arus ke arah perubahan relasi gender yang lebih baik dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Langkah ini sangatlah tepat dalam upaya memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Kesetaraan gender dalam mengakses kredit nampaknya dapat menggali potensi besar pada perempuan untuk dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara luas. Hasil penelitian di atas telah membuktikan hal tersebut. Melalui peningkatan kesetaraan gender dalam akses kredit berpeluang untuk membantu meningkatkan derajat dan martabat Bangsa Indonesia di dunia, melalui peningkatan Human Development Indeks (HDI).

Namun demikian, pada banyak hal, kesetaraan tersebut di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu berbagai upaya perlu terus dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan kesetaraan

aksesibilitas dalam kredit melalui harmonisasi perbaikan mulai dari perumusan kebijakan kredit maupun implementasi penyaluran kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Kajian Gender dalam Proyek Pembangunan Berbasis Komunitas: Implikasi bagi PNPM Mandiri. Kertas Kerja Mengenai Temuan-temuan dari Misi Bersama Lembaga Donor dan Pemerintah.
- Badan Pusat Statistik. 2004. Statistik Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga. Survei Usaha terintegrasi 2004. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Becker, G.S. 1981. A treatise on the family. Harvard University Press: Cambridge, MA.
- Bhagowalia, P, S. Chen and G. Shively. 2007. Short Term Investment in Agriculture: Is there a Gender Bias?. Department of Agricultural Economics, Purdue University 403 West State Street, West Lafayette IN 47907†
- Boserup, E. 1971. Women's role in economic development. St Martin's Press: New York. (2nd edition in 1986, Aldershot: Gower.)
- Buttner, E.H and B. Rosen. 1992. Rejection in the Loan Application Process. Male and Female Entrepreneurs' Perceptions and Subsequent Intentions. *Journal of Small Business Management*, Jan 1992: 30, 1. Pg. 58
- Coleman, S. 2000. Access to capital and terms of credit: A comparison of men- and women- owned Small Business. *Journal of Small Business Management*; Jul 2000; 38, 3; ABI/INFORM Global. pg. 37.
- Deininger, K, S. Galab And T. Olsen. 2005. Empowering Poor Rural Women In India: Empirical Evidence From Andhra Pradesh. Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24-27, 2005.
- Elfandi, S. 2000. Peranan Gender dalam Rumah Tangga Penerima Kredit Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Bogor. Disertasi. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Fakih, M. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fauzan, M. 1989. Beberapa Aspek Kredit dan Tabungan dalam Sektor Industri Kecil Masyarakat Pedesaan Jawa Tengah (Studi Kasus Industri Ukir Kayu dan Tenun di Dua Desa di Jepara Jawa Tengah). Tesis. Jurusan Studi Pembangunan Kegiatan Pengumpulan Kredit. Fakultas Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor dan Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fletschner, D. 2000. Enhancing Rural Women's Access to Capital: Why It Is Important and How It Can Be Done. The Case of Columbia. Staff Paper Series No. 437. October 2000. University of Wisconsin-Madison.
- Goetz, A.M, Sen Gupta R. 1994. Who takes the credit? Gender, power and control over loan use in rural credit programmes in Bangladesh. *World Development* 24(1): 45-63.
- Hossain, M. 1988. Credit for alleviation of rural poverty: The Grameen Bank in Bangladesh. Research Report 65, Washington D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Hashemi, S.M, Schuler SR, Riley AP. 1996. Rural credit programs and women's empowerment in Bangladesh. *World Development* 24(4): 635-653.

- Kabeer, N. 1997. Women, wages and intra-household power relations in urban Bangladesh. *Development and Change* 28(2): 261-302.
- Kabeer, N. 2001. Conflicts over credit: re-evaluating the empowerment potential of loans to women in rural Bangladesh. *World Development* 29(1): 63-84.
- Khandker, SR. 1998. *Fighting poverty with microcredit: experience in Bangladesh*. Oxford University Press: New York.
- Kim, G.O. 2006. Di Equally Owned Small Business Have Equal Access to Credit?. *Small Business Economics* (2006) 27: 369-386.
- Lu'lu. 2005. Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Kasus Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Manser, M, Brown M. 1980. Marriage and household decision-making: a Bargaining Analysis. *International Economic Review* 21(1): 31-44.
- Mardhatillah, S. 2005. Efektivitas Penyaluran Kredit Umum Pedesaan di Sektor Pertanian dan Analisis Pendapatan Petani Anggrek Pengguna kredit. (Studi Kasus BRI Unit Sawangan, Depok, Jawa Barat). Skripsi. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Mirdianingsih, D. 2006. Analisis Penyaluran dan Pengembalian Kredit Dana Bergulir Raksa Desa Sebagai Model Pendanaan Usaha Mikro di Wilayah Pembangunan Bogor Barat. Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Mosse, J.C. 1996. Gender dan Pembangunan. Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- MrKillop, D.G. , R. Brisco, O. McCarthy, M. Ward, and C. Ferguson. 2003. Irish Credit Unions: Exploring the Gender Mix. *International Journal of Voluntary and Non Profit Organizations*, Vol. 14. No. 3, September.
- Nainggolan, A. 2005. Analisis Gender Terhadap Keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Kasus di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Novitasari. 2006. Analisis Kinerja dan Dampak Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Kasus : Bank Rakyat Indonesia Unit Kreo, Tangerang). Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Nurmanaf, R., dkk. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Laporan akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonoipmi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Osmani, L.N. K. 2007. A Breakthrough In Women's Bargaining Power: The Impact Of Microcredit. *Journal of International Development J. Int. Dev.* 19, 695-716 (2007) Published online 31 January 2007 in Wiley Inter Science.
- Pitt, M.M, S.R. Khandker, and J. Cartwright. 2006. Empowering Women with Micro Finance: Evidence from Bangladesh. *Economic Development and Cultural Change*.
- Priyono E, dkk. 1999. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendorong Dinamika Perempuan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Perspektif Gender. Final Report kerjasama Center for Economics and Sosial Studies (CESS) dengan Swisscontact-Small and Medium Enterprise Promotion (SC-SMEP).

- Raturi, M and A. V. Swamy. 1999. Explaining Ethnic Differentials in Credit Market Outcomes in Zimbabwe. *Economic Development and Cultural Change*, 585 - 604.
- Rahman, A. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Penguatan Kelembagaan Kredit Mikro di Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Riza, W. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Serta Penilaian Kredit Bank yang Ideal. (Studi Kasus Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat). Skripsi. Program Studi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Safitri, I. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada Nasabah BRI Unit Ciampea Bogor. Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumah tangga Miskin. Disertasi. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Syukur, M dkk. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Storey, D.J. 2004. Racial and Gender Discrimination in the Micro Firms Credit Market?: Evidence from Trinidad and Tobago. *Small Business Economics* 23: 401-422. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Tarmidi. 2006. Efektivitas Pengelolaan Kredit Mikro Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Analisis Pendapatan Keluarga Miskin. Studi Kasus di Kota Depok. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, IPB.
- Velasco, C and R. Marconi. 2004. Group Dynamics, Gender and Microfinance in Bolivia. *Journal of International Development*. I. Int. Dev. 16, 519 -528. P.519
- Women's empowerment. *IDS Bulletin* 26(3): 56-68.
- Wulan, G. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Umum Pedesaan dan Perkotaan (Kasus pada BRI Unit Ciampea dan BRI Unit Citeureup). Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian .Institut Pertanian Bogor.
- Yuni, L. 2003. Respon Pengusaha Kecil terhadap Kredit Usaha Kecil dan Hubungannya dengan Perkembangan Usaha (Kasus Pedagang di Pasar Anyar dan pasar Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Yunus, M. 2007. Bank Kaum Miskin (Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan). Terjemahan. Marjin Kiri. Depok. Jakarta.